



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPD) TAHUN 2021

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**





KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semuanya berkat rahmat, ridho dan petunjukNya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 ini merupakan wujud Pertanggung Jawaban dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Program-program dimaksud yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; (2) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi; (3) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm); (4) Program Pengembangan UMKM; (5) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan; (6) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; (7) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting; (8) Program Pengembangan Ekspor; (9) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen; (10) Program ;Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; (11) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri; (12) Program Pengendalian Izin Usaha Industri; (13) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Akhirnya kami selaku Plt. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang tulus, serta senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin

Tanjung Selor, 07 Februari 2021
Plt. Kepala Dinas,





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.2.1 Maksud	1
1.2.2 Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.3.1 Tugas	2
1.3.2 Fungsi.....	2
BAB II GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	4
2.1 Sejarah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.....	4
2.2 Gambaran Perangkat Daerah	6
2.2.1 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Tahun 2021	6
2.2.2 Personil OPD	31
2.2.3 Sarana dan Prasarana OPD	35
2.3 Alokasi Anggaran OPD	41
2.3.1 Alokasi Anggaran Untuk APBD Tahun 2021	41
2.3.2 Alokasi Anggaran Untuk APBN Tahun 2021	47
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	48
3.1 Realisasi Program dan Kegiatan APBD dan APBN Tahun 2021	48
3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja	56
3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan	



Pendukung Pemerintahan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.....	60
3.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.....	75
3.5 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan.....	80
3.6 Dokumentasi Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.....	83
BAB IV PENUTUP	124



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat/Gol Ruang, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tahun 2021	31
Tabel 2.2	Tenaga Kerja Kontrak menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	31
Tabel 2.3	Daftar Pegawai Negeri Sipil.....	32
Tabel 2.4	Daftar Tenaga Kerja Kontrak	35
Tabel 2.5	Daftar Inventaris Barang Disperindagkop & UKM	35
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Untuk APBD Tahun 2021	41
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran Untuk APBN Tahun 2021	47
Tabel 2.8	Rekapitulasi Laporan Fisik dan Keuangan Pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Disperindagkop & UKM Tahun 2021	48
Tabel 2.9	Rekapitulasi Laporan Fisik dan Keuangan APBN Tahun 2021	55
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja	56
Tabel 2.11	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.....	60
Tabel 2.12	Kebijakan Strategis	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kantor Sementara Disperindagkop & UKM, 22 Juli 2013- 30 Mei 2014	4
Gambar 2.2 Kantor Sementara Disperindagkop & UKM, 1 Juni- 31 Desember 2014.....	4
Gambar 2.3 Kantor Sementara Disperindagkop & UKM Tahun 2015	5
Gambar 2.4 Kantor Sementara Disperindagkop & UKM Tahun 2016 s/d Sekarang.....	5
Gambar 2.5 Struktur Organisasi Disperindagkop & UKM Tahun 2020.....	6



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 ini, kami Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Utara, maka dengan ini kami bermaksud menyampaikan Laporan ini, dengan susunan metode sistematika sesuai dengan Surat Edaran Sekdaprov Kalimantan Utara Nomor : 100/0173/SETDA.I Tanggal 17 Desember 2021 dengan Perihal Permintaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Tahun 2021.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perindagkop & UKM Provinsi Kalimantan Utara ini juga kami memaparkan apa yang telah dilakukan dan perbuat, sehingga diperlukan adanya penjelasan yang detail dan tertulis, sesuai dengan apa yang Gubernur Kalimantan Utara inginkan guna mencapai tujuan Provinsi yang tertib laporan keuangan dan pertanggung jawaban, sehingga motto “Maju Berubah Sejahtera” dapat segera terwujud.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perindagkop & UKM Provinsi Kalimantan Utara ini dapat menjadi kerangka acuan kedepannya dalam memprogramkan rencana kerja dan rencana strategis pada tahun tahun kedepannya. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban pelaksanaan program dan kegiatan merupakan salah satu sarana penyampaian informasi dan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan program, kegiatan dan sub kegiatan Disperindagkop dan UKM Provinsi



Kalimantan Utara Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2021, dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026.

1.2.2 Tujuan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Utara selama tahun anggaran 2021.

1.3 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 79 dan 80 Paragraf 2 dan 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1.3.1 Tugas

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1.3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Permusan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Perindustrian;



- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan Industri;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sistem Informasi Industri;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sarana Distribusi Perdagangan;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Ekspor;
- i. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis
- l. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



BAB II

GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Sejarah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sebagai Daerah Otonom Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012. Sebagai Provinsi baru yang ke 34 di Indonesia secara resmi mulai aktif sejak tanggal 22 April 2012 seiring dengan dilantikannya Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Bapak Dr. H. Irianto Lambrie oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tjahjo Kumolo atas nama Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonom Baru berupaya meletakkan dasar-dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara Bab II Pasal 3 (tiga).

Pada awal berdiri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara, berkantor sementara pada tanggal 22 Juli



Gambar 2.1 Kantor Sementara Disperindagkop & UKM, 22 Juli 2013- 30 Mei 2014



Gambar 2.2 Kantor Sementara Disperindagkop & UKM, 1 Juni 2014- 31 Desember 2014



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

2013 s/d tanggal 30 Mei 2014 di Jalan Kol. H. Soetadji Tanjung Selor menumpang pada Kantor Biro Kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara di lantai 2.

Kemudian pada tahun 2014, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara pindah ke Jalan Jeruk Tanjung Selor menyewa sebuah rumah selama 6 bulan, dengan alasan bertambahnya pegawai dan ruang kerja yang dibutuhkan tidak mencukupi/memadai, akhirnya pindah ke Jalan Langsung juga menyewa rumah dan berkantor kurang lebih satu tahun.

Pada tahun 2015 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara telah mendapat jatah CPNS sebanyak 20 orang dan melihat kondisi Kantor di Jalan Langsung kurang memadai dan rawan terkena bencana alam banjir, maka pada awal tahun 2016 Dinas



Gambar 2.3 Kantor Sementara Disperindagkop & UKM Tahun 2015

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara pindah dan berkantor ke Jalan Raya Sengkawit Kompleks Pasar Induk Tanjung Selor hingga sekarang dengan menyewa 3 lantai. Dan pada tahun



Gambar 2.4 Kantor Sementara Disperindagkop & UKM Tahun 2016 s/d Sekarang

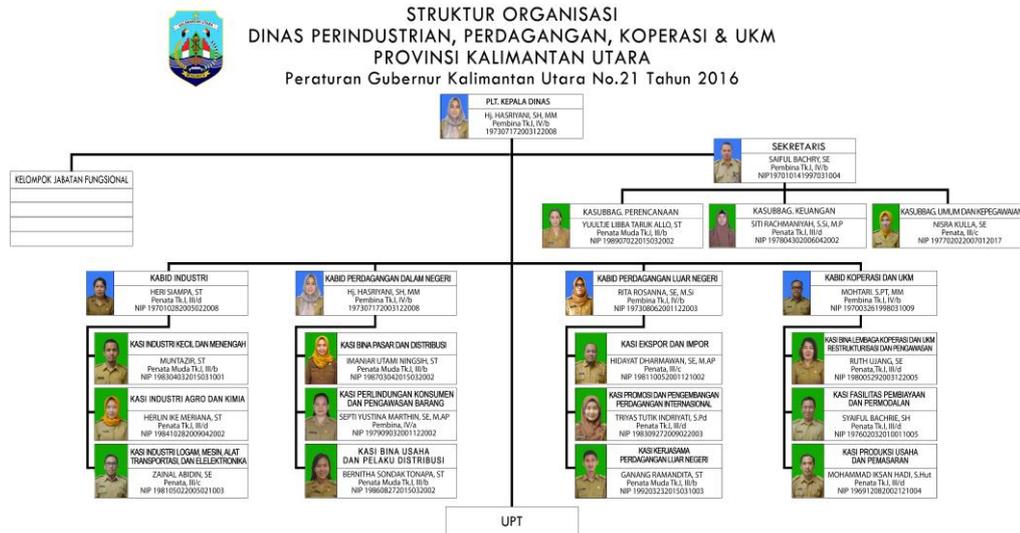


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

2018, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara mendapat jatah CPNS sebanyak 14 orang.

2.2 Gambaran Organisasi Perangkat Daerah

2.2.1 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Tahun 2021



Gambar 2.5 Struktur Organisasi Disperindagkop & UKM Tahun 2021

Sesuai dengan dengan Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2016, yang didalamnya terdapat Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang menaungi 4 (Empat) Bidang dan 1 Sekretariat. Bidang tersebut antara lain Bidang Industri, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri serta Bidang Koperasi dan UKM.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan memiliki 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Bidang Industri dipimpin oleh Kepala Bidang Industri dan memiliki 3 (Tiga) Kepala Seksi yaitu; Kepala Seksi IKM, Kepala Seksi Industri Agro dan Kepala Seksi ILMATE. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan memiliki 3 (Tiga) Kepala Seksi yaitu; Kepala Seksi Pasar dan Distribusi, Kepala



Seksi Perlindungan Konsumen, dan Kepala Seksi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. Bidang Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dan memiliki 3 (Tiga) Kepala Seksi yaitu; Kepala Seksi Ekspor dan Impor, Kepala Seksi Promosi & Pengembangan Perdagangan Internasional, dan Kepala Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri. Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM juga memiliki 3 (Tiga) Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM, Restrukturisasi dan Pengawasan, Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan, dan Kepala Seksi Produksi Usaha dan Pemasaran.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara tercantum Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
 - b. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
 - c. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;



- e. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- f. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- g. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- j. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil
- m. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan



kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2) Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- g. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;



- i. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
- 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, Lakip sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas;
 - g. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
 - h. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan



peraturan perundangundangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;

- i. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

4) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi;
- f. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan



pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;

- h. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - i. Menyusun dan membuat laporan hasil monitoring realisasi inventaris barang/aset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.
- 5) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;



- e. Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan;
 - f. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
 - g. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
 - h. Menyiapkan laporan hasil monitoring realisasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya;
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.
- 6) Kepala Bidang Industri mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan program kegiatan Seksi Industri Kecil dan Menengah, Seksi Industri Agro dan Kimia, Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika sesuai dengan kebijakan dari Kepala Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada Seksi Industri Kecil dan Menengah, Seksi Industri Agro dan Kimia, dan Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah, Seksi Industri Agro dan Kimia, dan Seksi Industri Logam,



Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;

- d. Menyelia pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Kecil dan Menengah, Seksi Industri Agro dan Kimia, dan Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika sesuai dengan tugas masing-masing agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
 - e. Melaksanakan kegiatan Seksi Industri Kecil dan Menengah, Seksi Industri Agro dan Kimia, dan Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Mengevaluasi kegiatan Seksi Industri Kecil dan Menengah, Seksi Industri Agro dan Kimia, dan Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. Melakukan pembinaan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk meningkatkan kinerja bawahan;
 - h. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Industri Kecil dan Menengah, Seksi Industri Agro dan Kimia, dan Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika kepada pimpinan;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulis dan melaporkan kepada pimpinan.
- 7) Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan industri kecil dan menengah yang meliputi perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, standarisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efisien dan efektif;



- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar oprasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - d. Membimbing dan melakukan penilaian kepada bawahan agar oprasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - e. Melaksanakan kegiatan industri kecil dan menengah baik secara teknis maupun operasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - f. Mengevaluasi hasil kegiatan industri kecil dan menengah berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan industri kecil dan menengah berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan kepada pimpinan.
- 8) Kepala Seksi Industri Agro dan Kimia mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan industri agro dan kimia meliputi: pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, industri minuman dan tembakau, industri kimia hulu dan industri kimia hilir sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;



- c. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - d. Membimbing dan melakukan kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - e. Melaksanakan kegiatan industri agro dan kimia baik secara teknis dan operasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - f. Mengevaluasi hasil kegiatan industri agro dan kimia berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan industri agro dan kimia berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan kepada pimpinan.
- 9) Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika meliputi: perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efisien dan efektif;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;



- c. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d. Membimbing dan melakukan penilaian kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan kegiatan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika baik kerja teknis dan operasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- f. Mengevaluasi hasil kegiatan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- g. Melaporkan hasil kegiatan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan kepada pimpinan.

10) Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional pelaksanaan kegiatan Bina Pasar dan Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan, Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, sesuai dengan kebijakan dari Kepala Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
- b. Mendistribusikan tugas dengan Seksi Bina Pasar dan Distribusi, Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan, Seksi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;



- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Seksi Bina Pasar dan Distribusi, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan, Seksi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;
 - d. Membimbing dan melakukan penilaian kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - e. Menyelia pelaksanaan kegiatan Bina Pasar dan Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan, Bina Usaha dan Pelaku Distribusi sesuai dengan tugas masing-masing agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
 - f. Melaksanakan kegiatan Bina Pasar dan Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan, Bina Usaha dan Pelaku Distribusi baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. Mengevaluasi kegiatan Bina Pasar dan Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan, Bina Usaha dan Pelaku Distribusi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. Melaporkan hasil kegiatan Bina Pasar dan Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan, Bina Usaha dan Pelaku Distribusi;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan kepada pimpinan.
- 11) Kepala Seksi Bina Pasar dan Distribusi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan bina pasar dan distribusi meliputi: pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi, kerjasama



logistik, barang kebutuhan pokok dan barang penting, perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien;

- b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. Membimbing dan melakukan penilaian kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan kegiatan bina pasar dan distribusi baik kerja teknis dan operasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- g. Mengevaluasi hasil kegiatan bina pasar dan distribusi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- h. Melaporkan hasil kegiatan bina pasar dan distribusi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan kepada pimpinan.

12) Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang meliputi: pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu



barang, tertib ukur dan pengawasan barang beredar dan /atau jasa dipasar sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien;

- b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. Membimbing dan melakukan penilaian kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang baik kerja teknis dan operasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- g. Mengevaluasi hasil kegiatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- h. Melaporkan hasil kegiatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan kepada pimpinan.

13) Kepala Seksi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan bina usaha dan pelaku usaha meliputi: penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan



- pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - e. Membimbing dan melakukan penilaian kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - f. Melaksanakan kegiatan bina usaha dan pelaku usaha baik kerja teknis dan operasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - g. Mengevaluasi hasil kegiatan bina usaha dan pelaku usaha berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - h. Melaporkan hasil kegiatan bina usaha dan pelaku usaha berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan kepada pimpinan.
- 14) Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan rencana operasional pelaksanaan kegiatan Ekspor dan Impor, Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional, Kerjasama Perdagangan Luar Negeri, sesuai dengan kebijakan dari Kepala Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;



- b. Mendistribusikan tugas dengan Seksi Ekspor dan Impor, Seksi Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional, dan Seksi Kerjasama Perdagangan Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Seksi Ekspor dan Impor, Seksi Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional, dan Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;
- d. Mengarahkan dan melakukan penilaian kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. Menyelia pelaksanaan kegiatan Ekspor dan Impor, Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional, Kerjasama Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan tugas masing-masing agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
- f. Melaksanakan kegiatan Ekspor dan Impor, Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional, Kerjasama Perdagangan Luar Negeri baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Mengevaluasi kegiatan Ekspor dan Impor, Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional, Kerjasama Perdagangan Luar Negeri secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Melaporkan hasil kegiatan Ekspor dan Impor, Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional, Kerjasama Perdagangan Luar Negeri;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan kepada pimpinan.



15) Kepala Seksi Ekspor Impor mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan ekspor dan impor meliputi: perumusan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang kerja sama internasional, pembiayaan perdagangan, prosedur dan dokumen, penunjang perdagangan internasional, pelayanan perdagangan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. Membimbing dan melakukan penilaian kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan kegiatan ekspor dan impor baik kerja teknis dan operasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- g. Mengevaluasi hasil kegiatan ekspor dan impor berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- h. Melaporkan hasil kegiatan ekspor dan impor berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan kepada pimpinan.

16) Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :



- a. Merencanakan kegiatan promosi dan pengembangan perdagangan internasional meliputi: pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. Membimbing dan melakukan penilaian kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan kegiatan promosi dan pengembangan perdagangan internasional baik kerja teknis dan operasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- g. Mengevaluasi hasil kegiatan promosi dan pengembangan perdagangan internasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- h. Melaporkan hasil kegiatan promosi dan pengembangan perdagangan internasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan kepada pimpinan.



17) Kepala Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan kerjasama perdagangan luar negeri meliputi: kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. Membimbing dan melakukan penilaian kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan kegiatan kerjasama perdagangan luar negeri baik kerja teknis dan operasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- g. Mengevaluasi hasil kegiatan kerjasama perdagangan luar negeri berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- h. Melaporkan hasil kegiatan kerjasama perdagangan luar negeri berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan kepada pimpinan.



- 18) Kepala Bidang Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan operasional pelaksanaan kegiatan bina lembaga koperasi dan UKM, restrukturisasi usaha dan pengawasan, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, produksi usaha dan pemasaran sesuai dengan kebijakan dari Kepala Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
 - b. Mendistribusikan tugas dengan Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM, Restrukturisasi Usaha dan Pengawasan, Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan, Seksi Produksi Usaha dan Pemasaran sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM, Restrukturisasi Usaha dan Pengawasan, Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan, Seksi Produksi Usaha dan Pemasaran sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;
 - d. Membina dan melakukan penilaian kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - e. Menyelia pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM, Restrukturisasi Usaha dan Pengawasan, Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan, Seksi Produksi Usaha dan Pemasaran sesuai dengan tugas;
 - f. Melaksanakan kegiatan Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM, Restrukturisasi Usaha dan Pengawasan, Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan, Seksi Produksi Usaha dan Pemasaran secara berkala baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. Mengevaluasi kegiatan Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM, Restrukturisasi Usaha dan Pengawasan, Seksi Fasilitasi



Pembiayaan dan Permodalan, Seksi Produksi Usaha dan Pemasaran secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- h. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM, Restrukturisasi Usaha dan Pengawasan, Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan, Seksi Produksi Usaha dan Pemasaran;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan kepada pimpinan.

19) Kepala Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM, Restrukturisasi dan Pengawasan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan bina lembaga koperasi dan UKM, restrukturisasi usaha dan pengawasan meliputi: perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyuluhan perkoperasian, peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi, peningkatan partisipasi anggota, penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan penerapan dan kepatuhan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi dan usaha simpan pinjam, penindakan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;



- c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - e. Melakukan penilaian kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - f. Melaksanakan kegiatan bina lembaga koperasi dan UKM, restrukturisasi usaha dan pengawasan baik kerja teknis dan operasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - g. Mengevaluasi hasil kegiatan bina lembaga koperasi dan UKM, restrukturisasi usaha dan pengawasan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - h. Melaporkan hasil kegiatan bina lembaga koperasi dan UKM, restrukturisasi usaha dan pengawasan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan kepada pimpinan.
- 20) Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan fasilitasi pembiayaan dan permodalan meliputi: perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan program pendanaan, pengembangan, dan pengendalian usaha simpan pinjam, permodalan, asuransi, jasa keuangan, pembiayaan, penjaminan kredit, serta permodalan sendiri koperasi dan UKM sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien;



- b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. Melakukan penilaian kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pembiayaan dan permodalan baik kerja teknis dan operasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- g. Mengevaluasi hasil kegiatan fasilitasi pembiayaan dan permodalan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- h. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pembiayaan dan permodalan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan kepada pimpinan.

21) Kepala Seksi Produksi Usaha dan Pemasaran mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan produksi usaha dan pemasaran meliputi: perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas produksi di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, dan industri serta jasa, peningkatan standarisasi produk, serta penguatan jaringan usahasesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien;



- b. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. Melakukan penilaian kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan kegiatan produksi usaha dan pemasaran baik kerja teknis dan operasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- g. Mengevaluasi hasil kegiatan produksi usaha dan pemasaran berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- h. Melaporkan hasil kegiatan produksi usaha dan pemasaran berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan kepada pimpinan.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- c. Pelaksanaan pelayanan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- d. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala Dinas.



2.2.2 Personil OPD

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2021 memiliki aparatur sipil negara yang terdiri Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak. Berikut ini disajikan tabel Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pangkat, Jenis Kelamin dan Pendidikan.

Tabel 2.1 Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat/Gol. Ruang, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tahun 2021

Tahun	Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1	D3	SMA/SMK	SLTP	SD	
2021	6	37	4	-	25	23	9	34	4	3	-	0	47

Berikut ini disajikan Tabel Tenaga Kerja Kontrak menurut pendidikan dan jenis kelamin di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Tabel 2.2 Tenaga Kerja Kontrak menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Tahun	Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai Kontrak
	L	P	S2	S1	D3	SMA/SMK	SLTP	SD	
2021	14	10	0	12	1	11	0	0	24

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM hingga Desember 2021 memiliki 47 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 24 Tenaga Kerja Kontrak. Berikut Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Tahun 2021.

Tabel 2.3 Daftar Pegawai Negeri Sipil

No	Nama / NIP	Jabatan
1	Saiful Bachry, SE	Sekretaris
	NIP. 19701014 199703 1 004	
2	Rita Rosanna, SE, M.Si	Kabid. Perdagangan LN
	NIP. 197308062001122003	
3	Mohtari, S.PT., MM	Kabid. Koperasi & UKM
	NIP. 19700326 199803 1 009	
4	Hj. Hasriyani, SH, MM	Kabid. Perdagangan DN
	NIP. 197307170200312 2 008	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

5	Heri Siampa, ST	Kabid Industri
	NIP. 19701028 200502 2 008	
6	Septi Yustina Marthin, SE, M.AP	Kasi. Perlindungan Konsumen & Pengawasan Barang
	NIP. 19790903 200112 2 002	
7	Mohammad Ikhsan Hadi, S.Hut	Kasi Produksi Usaha & Pemasaran
	NIP. 19691208 200212 1 004	
8	Muntazir, S.T	Kasi Industri Kecil & Menengah
	NIP. 19830403 201503 1 001	
9	Siti Rachmaniyah, S.SI., M.P	Kasubbag Keuangan
	NIP. 19780430 200604 2002	
10	Imaniar Utami Ningsih, S.T	Kepala Seksi Bina Pasar dan Distribusi
	NIP. 19870304 201503 2 002	
11	Ruth Ujang, SE	Kasi. Bina Lembaga Kop. & UKM, Rekstrukturasi & Pengawasan
	NIP. 19800529 200312 2 005	
12	Herlin Ike Meriana, ST	Kasi. Industri Agro & Kimia
	NIP. 19841028 200904 2 002	
13	Syaiful Bachrie, SH	Kasi Fasilitas Pembiayaan & Permodalan
	NIP. 19760203 201001 1 005	
14	Triyas Tutik Indriyati, S.Pd	Kasi Promosi & Pengembangan Perdagangan Internasional
	NIP. 19830927 200902 2 003	
15	Hidayat Dharmawan, SE	Kasi Ekspor & Impor
	NIP. 1981105 200112 1 002	
16	Nisra Kulla, SE	Kasubbag Umum & Kepegawaian
	NIP. 19770202 200701 2 017	
17	Bernitha Sondak Tonapa, S.T	Kasi Bina Usaha & Pelaku Distribusi
	NIP. 19860827 201503 2 002	
18	Zainal Abidin, SE	Kasi ILMATE
	NIP. 19810502 200502 1 003	
19	Yuultje Libba Taruk Allo, S. T	Kepala Sub Bagian Perencanaan
	NIP. 19890702 201503 2 002	
20	Ganang Ramandita, S.T	Kasi. Kerjasama Perdagangan Luar Negeri
	NIP. 19920323 201503 1 003	
21	Rina Susanti, S.HUT., M.Sc	Analisis Pengembangan Usaha Agroindustri
	NIP. 19760221 200003 2 001	
22	Agustian Arsyad, S.PT	Analisis Pemasaran Dan Kerjasama
	NIP. 19710816 199103 1 006	
23	Markus Keru	Pengadministrasi Umum
	NIP. 19641206 199403 1 005	
24	Bety, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan
	NIP. 19790402 200701 2 013	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

25	S Agus Widada, ST.	Analisis Proses Akreditasi Industri
	NIP.19821026 201503 1 002	
26	Nizaruddin, ST.	Analisis Proses Akreditasi LS Produk, Personel, Halal, Pangan Organik
	NIP.19840330 201503 1 001	
27	Tomy Saroha Lumban Gaol, S.Sos	Analisis Pegawai
	NIP. 19860308 201503 1 004	
28	Dedi Yoga Pratama, S.Sos	Analisis Pengawasan
	NIP.19881101 201503 1 003	
29	Akhmad Rifai, S.T	Analisis Proses Akreditasi Industri
	NIP.19881209 201503 1 002	
30	Mitfahul Fariz, S.Sos	Analisis Perencanaan
	NIP.19891006 201503 1 002	
31	Rayan Pery Apari, SE	Analisis Pengembangan Pasar
	NIP.19780202 200212 1 004	
32	Yonas Andarias, S.IP	Analisis Barang Milik Negara
	NIP. 19840107 201802 1 001	
33	Yulitha Riani Limbu D, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan
	NIP.19861126 201802 2 001	
34	Wahid Syahbani, S.Sos	Analisis Koperasi
	NIP. 19870414 201802 1 001	
35	Eka Indriyani, S.Kom	Analisis Data dan Informasi
	NIP. 19880128 201802 2 001	
36	Alga Adhi Chandra, ST	Pengelola Sarana Perindustrian
	NIP. 19880226 201802 1 002	
37	Erol Saputra, S.IP	Pengelola Kepegawaian
	NIP. 19890315 201802 1 001	
38	Riduan Husen, S.IP	Analisis Kerjasama Bileteral dan Regional
	NIP. 19910319 201802 1 001	
39	Bernadetta Desy A., SE	Penyusun Rencana Analisis Pasar Dalam Negeri
	NIP. 19911212 201802 2 001	
40	Dwi Harsunue Putra, ST	Penguji Mutu Barang Pertama
	NIP. 19940123 201802 1 001	
41	Wolter Kinsky Rohy, S.Sos	Penyusun Rencana Analisis Pasar Luar Negeri
	NIP. 19940411 201802 1 002	
42	Hadi Susanto, S.IP	Analisis Kerjasama Bileteral dan Regional
	NIP. 19941001 201802 1 002	
43	Deputri Novta Ariska, SE	Fasilitator Kewirausahaan
	NIP. 19951118 201802 2 001	
44	Herawati, A.Md	Pengadministrasi Keuangan
	NIP.19820410 201503 2 002	
45	Nunung Kesnawati, A.Md	Verifikator Keuangan
	NIP.19851112 201503 2 002	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

46	Masrah Misnawati, A.Md	Pengadministrasi Keuangan
	NIP. 19840103 201802 2 001	
47	Senthia Vivin Lilit	Pengadministrasi Umum
	NIP.19950917 201503 2 001	

Tabel 2.4 Daftar Tenaga Kerja Kontrak

No.	Nama	Jabatan
1	Arfani	Operator Komputer di Bidang PDN
2	Anisa Indah Susilorini, SP	Operator Komputer di Subbag Umum dan Kepeg.
3	Mardiono Tresno Wibowo, SH	Operator Komputer di Bidang Industri
4	Abdul Salam, SPd	Operator Komputer di Bidang Koperasi dan UKM
5	Fitri Aprilia Sa'diah, S.Si	Operator Komputer di Subbag Umum dan Kepeg.
6	Khorinda Octa H.A,S.Si	Operator Komputer di Subbag Keuangan
7	Lia Hambar Sari, SE	Pengelola Administrasi di Subbag Umum dan Kepeg.
8	Desy Oktavia Kristiani, A.Md	Pengelola Administrasi di Bidang Industri
9	Riski Anisa, S.Sos	Pengelola Administrasi Kepala Dinas
10	Rendy Fahrizal, ST	Pengelola Administrasi di Bidang Daglu
11	Yonathan Marthin, S.Ip	Operator Komputer di Bidang PDN
12	Abdul Salam, S. Pd	Operator Komputer di Bidang Koperasi dan UKM
13	Cherina, S.P	Pengelola Administrasi di Subbag Umum dan Kepeg.
14	Sapriansyah	Pengelola Administrasi di Subbag Keuangan
15	Ratna Damayanti	Pengelola Administrasi di Subbag Keuangan
16	Hendra	Pengelola Administrasi di Subbag Perencanaan
17	Choirul Anwar, SE	Satpam
18	Ramli Hayun	Satpam
19	Achmad Rio	Satpam



20	Abdul Mujib	Caraka di Subbag Umum dan Kepeg.
21	Taufiq M.	Sopir
22	Mohtar	Cleaning Service
23	Zulkifli	Cleaning Service
24	Siti Khotimah	Cleaning Service

2.2.3 Sarana dan Prasarana OPD

Dari Tahun 2013 sampai dengan 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara telah melengkapi berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perkantoran dan kegiatan teknis yang digunakan pada program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Berikut daftar Inventaris Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara :

Tabel. 2.5 Daftar Inventaris Barang Disperindagkop & UKM

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Keadaan Barang	Keterangan
1	Motor	3 Unit	2013	Baik	
		6 Unit	2014	Baik	
2	Mobil	3 Unit	2013	Baik	
		4 unit	2014	Baik	
3	PC Lenovo	2 Unit	2013	Baik	
		2 Unit	2014	Baik	
	PC Acer	5 Unit	2015	Baik	
		2 Unit	2016	Baik	
		1 Unit	2017	Baik	
		5 Unit	2018	Baik	
PC HP	4 Unit	2019	Baik		
	2 Unit	2020	Baik		
4	Laptop Acer	2 Unit	2014	Baik	
	Laptop Asus	5 Unit	2014	Baik	
	Laptop Asus	6 Unit	2015	Baik	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

	A555 Laptop Asus	5 Unit	2015	Baik	
	Laptop Asus	2 Unit 2 unit	2016 2017	Baik Baik	
5	Filling Kabinet	6 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit	2014 2015 2017 2018 2019	Baik Baik Baik Baik Baik	
5	Lemari Arsip	3 Unit 5 Unit 5 Unit 2 Unit	2014 2017 2019 2020	Baik Baik Baik Baik	
7	Lemari Kaca	2 Unit 4 Unit	2018 2021	Baik Baik	
8	Bingkai / Pigura	4 Unit	2018	Baik	
9	Lemari Kayu	7 Unit 7 Unit 2 Unit	2014 2015 2019	Baik Baik Baik	
10	Printer Brother	1 Unit	2014	Baik	
	Printer Canon Pixma	5 Unit	2014	Baik	
	Printer Epson L210	2 Unit	2014	Baik	
	Printer LX310	1 Unit	2014	Baik	
	Printer HP Laserjet	3 Unit	2015	Baik	
	Printer Epson L220	7 Unit	2015	Baik	
	Printer Epson L220	7 Unit	2016	Baik	
	Printer Xerox Multi Fungsi	1 Unit	2016	Baik	
	Printer Dot Matrik LX-310	1 Unit	2016	Baik	
	Printer Canon Pixma G4010	1 Unit	2019	Baik	
	Printer Epson	1 Unit	2020	Baik	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

	L5190	6 Unit	2021		
	Printer Epson L5191	1 Unit	2020	Baik	
11	Handy Cam Sony	1 Unit	2014	Baik	
	Camera	2 Unit	2014	Baik	
12	Unit Power Supply (UPS)	8 Unit	2015	Baik	
		3 Unit	2017	Baik	
13	Mesin Ketik Manual	5 Unit	2015	Baik	
		2 Unit	2016	Baik	
14	Mesin Ketik Elektrik	4 Unit	2014	Baik	
15	Lemari Es	2 Unit	2014	Baik	
		1 Unit	2015	Baik	
	Dispenser	2 Unit	2014	Baik	
		1 Unit	2018	Baik	
16	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	2014	Baik	
		4 Unit	2015	Baik	
17	Kipas Angin	3 Unit	2014	Baik	
18	Proyektor	1 Unit	2014	Baik	
19	Meja Rapat	1 Unit	2014	Baik	
		1 Unit	2016	Baik	
20	Papan Pengumuman	2 Unit	2014	Baik	
	Papan Intansi	1 Unit	2015	Baik	
	Papan Visual	1 Unit	2018	Baik	
	Papan Display	1 Unit	2018	Baik	
		1 Unit	2019	Baik	
21	AC Unit	4 Unit	2014	Baik	
		5 Unit	2015	Baik	
		2 Unit	2016	Baik	
22	Televisi	2 Unit	2014	Baik	
		2 Unit	2015	Baik	
		1 Unit	2016	Baik	
23	Sound System	1 Unit	2018	Baik	
	Wireless	3 Unit	2016	Baik	
	Mesin Absensi	1 Unit	2015	Baik	
24	Lemari Besi	1 Unit	2014	Baik	
		1 Unit	2015	Baik	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

25	Sofa	3 Unit	2014	Baik	
26	Rak Kayu	4 Unit	2014	Baik	
		1 Unit	2019	Baik	
27	Rak Penyimpanan	3 Unit	2018	Baik	
28	Mesin Penghitung Uang	1 Unit	2015	Baik	
29	Meja Kerja Pejabat Ess II	1 Unit	2013	Baik	
		1 Unit	2016	Baik	
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit	2013	Baik	
		4 Unit	2014	Baik	
		1 Unit	2016	Baik	
31	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	4 Unit	2013	Baik	
		34 Unit	2015	Baik	
		2 Unit	2018	Baik	
32	Kursi Kerja Pejabat Ess II	1 Unit	2013	Baik	
		1 Unit	2014	Baik	
33	Kursi Kerja Eselon III	5 Unit	2013	Baik	
		1 Unit	2018	Baik	
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit	2018	Baik	
35	Kursi Pejabat Lain-Lain	15 Unit	2013	Baik	
36	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit	2014	Baik	
		10 Unit	2018	Baik	
		3 Unit	2019	Baik	
		10 Unit	2021	Baik	
37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	9 Unit	2014	Baik	
		14 Unit	2018	Baik	
38	Kursi Kerja Non Struktural	31 Unit	2014	Baik	
		14 Unit	2018	Baik	
		7 Unit	2021	Baik	
39	Kursi Rapat	20 Buah	2014	Baik	
		24 Buah	2016	Baik	
40	Kursi Putar	20 Buah	2015	Baik	
41	Tenda	50 Unit	2015	Baik	
		50 Unit	2017	Baik	
42	Meja Komputer	2 Unit	2014	Baik	
		1 Unit	2019	Baik	
43	Genset	1 Unit	2016	Baik	
44	Hardisk	6 Unit	2020	Baik	
45	Kursi Dorong (Sella)	1 Unit	2021	Baik	
46	Patung Peraga Pakaian	6 Unit	2021	Baik	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

47	Barang Bercorak Kesenian lainnya Adat Tidung	2 Unit	2021	Baik	
	Barang Bercorak Kesenian lainnya Adat Bulungan	2 Unit	2021	Baik	
	Barang Bercorak Kesenian lainnya Adat Dayak	2 Unit	2021	Baik	
48	Marketplace	1 Unit	2021	Baik	



2.3 Alokasi Anggaran OPD

Pada Tahun 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara mengelola Keuangan yang berasal dari APBD dan APBN. Berikut daftar Alokasi Anggaran untuk APBD dan APBN Tahun Anggaran 2021.

2.3.1 Alokasi Anggaran APBD Tahun 2021

Tabel 2.6 Anggaran Untuk APBD Tahun 2021

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	2 17 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.101.327.785
	2 17 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.347.000
1	2 17 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.347.000
	2 17 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.341.096.141
2	2 17 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.006.558.141
3	2 17 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.334.538.000
	2 17 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.400.000
5	2 17 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.400.000
	2 17 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	946.864.555
6	2 17 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.590.000
7	2 17 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.159.003
8	2 17 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	212.760.046



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

9	2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	164.609.506
10	2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.880.000
11	2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	473.866.000
	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.666.500
12	2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	26.666.500
	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.453.589
13	2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.600.000
14	2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.333.589
15	2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.860.000
	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606.500.000
16	2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000
17	2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	426.500.000
	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	179.662.090
	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	179.662.090
18	2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	179.662.090
	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.790.416.000
	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1.790.416.000



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

19	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.790.416.000
	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.076.533.561
	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.076.533.561
20	2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2.076.533.561
	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	141.655.256
	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	141.655.256
21	3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	141.655.256
	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	9.024.999.281
	3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	9.024.999.281
22	3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	9.024.999.281
	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	273.946.320
	3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	64.253.545
24	3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	64.253.545



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

	3	30	04	1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	209.692.775	
25	3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	59.693.640
26	3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	149.999.136
	3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	493.854.849	
	3	30	05	1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	493.854.849	
27	3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	21.930.000
29	3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	219.497.545
30	3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	252.427.304
	3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	345.299.098	
	3	30	06	1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	119.640.000	
31	3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	118.100.000
32	3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	1.540.000
	3	30	06	1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	225.659.098	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

33	3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	225.659.098
	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	36.011.500
	3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	36.011.500
34	3	30	07	1.03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	28.611.500
35	3	30	07	1.03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	7.400.000
	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	919.729.509
	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	919.729.509
36	3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	252.554.072
37	3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	90.000.000
38	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	577.175.437
	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	174.241.787
	3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	174.241.787
39	3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	174.241.787



	3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	142.945.948	
	3	31	04	1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	142.945.948	
40	3	31	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	6.650.000
41	3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	136.295.948
TOTAL REALISASI						26.699.962.985	



2.3.2 Alokasi Anggaran Untuk APBN Tahun 2021

Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Untuk APBN Tahun 2021

No	Perangkat Daerah / Kode Satker	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran 2021
1	Satker 417681	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	836.540.000
2	Satker 417752	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	629.036.000
3	Satker 417753	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	401.711.000
4	Satker 417754	Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	1.037.405.000
Total			2.904.692.000



BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

Pada Setiap bulan setiap OPD di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara membuat Laporan Realisasi Anggaran, dimana Laporan tersebut menampilkan informasi atas Capaian Realisasi Program Kegiatan yang telah dilaksanakan pada satu bulan tersebut. Berikut disampaikan data Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD dan APBN.

Tabel 2.8 Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Disperindagkop & UKM Tahun 2021

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN
					FISIK		KEUANGAN			
					FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KEU. (%)	TTB	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.101.327.785	41,58	96,01	39,92	9.168.219.842	82,59	34,34	1.933.107.943,00
	2 17 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.347.000	0,06	60,54	0,04	10.501.685	60,54	0,04	6.845.315,00
1	2 17 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.347.000	0,06	60,54	0,04	10.501.685	60,54	0,04	6.845.315,00
	2 17 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.341.096.141	34,98	99,05	34,65	7.811.705.938	83,63	29,26	1.529.390.203,00



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

2	2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.006.558.141	29,99	99,50	29,84	6.606.199.333	82,51	24,74	1.400.358.808,00
3	2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.334.538.000	5,00	96,40	4,82	1.205.506.605	90,33	4,51	129.031.395,00
	2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.400.000	0,13	97,74	0,13	34.600.000	97,74	0,13	800.000,00
5	2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.400.000	0,13	97,74	0,13	34.600.000	97,74	0,13	800.000,00
	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	946.864.555	3,55	71,05	2,52	625.569.028	66,07	2,34	321.295.527,00
6	2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.590.000	0,18	100,00	0,18	39.222.200	80,72	0,15	9.367.800,00
7	2	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.159.003	0,13	100,00	0,13	32.460.340	92,32	0,12	2.698.663,00
8	2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	212.760.046	0,80	99,93	0,80	194.990.715	91,65	0,73	17.769.331,00
9	2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	164.609.506	0,62	32,65	0,20	38.319.230	23,28	0,14	126.290.276,00
10	2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.880.000	0,04	95,45	0,04	9.240.000	77,78	0,03	2.640.000,00
11	2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	473.866.000	1,77	65,70	1,17	311.336.543	65,70	1,17	162.529.457,00
	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.666.500	0,10	100,00	0,10	23.408.000	87,78	0,09	3.258.500,00
12	2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	26.666.500	0,10	100,00	0,10	23.408.000	87,78	0,09	3.258.500,00
	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.453.589	0,48	97,19	0,46	108.845.200	85,40	0,41	18.608.389,00



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

13	2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.600.000	0,04	94,31	0,04	10.330.000	89,05	0,04	1.270.000,00
14	2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.333.589	0,38	100,00	0,38	90.380.200	89,49	0,34	10.613.389,00
15	2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.860.000	0,06	80,35	0,04	8.135.000	54,74	0,03	6.725.000,00
	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606.500.000	2,27	95,98	2,18	553.589.991	91,28	2,07	52.910.009,00
16	2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000	0,67	86,46	0,58	129.189.991	71,77	0,48	50.810.009,00
17	2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	426.500.000	1,60	100,00	1,60	424.400.000	99,51	1,59	2.100.000,00
	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	179.662.090	0,67	34,34	0,23	61.697.300	34,34	0,23	117.964.790,00
	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	179.662.090	0,67	34,34	0,23	61.697.300	34,34	0,23	117.964.790,00
18	2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	179.662.090	0,67	34,34	0,23	61.697.300	34,34	0,23	117.964.790,00
	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.790.416.000	6,71	60,77	4,08	1.081.239.308	60,39	4,05	709.176.692,00
	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1.790.416.000	6,71	60,77	4,08	1.081.239.308	60,39	4,05	709.176.692,00



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

19	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.790.416.000	6,71	60,77	4,08	1.081.239.308	60,39	4,05	709.176.692,00
	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.076.533.561	7,78	64,43	5,01	1.338.014.050	64,43	5,01	738.519.511,00
	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.076.533.561	7,78	64,43	5,01	1.338.014.050	64,43	5,01	738.519.511,00
20	2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2.076.533.561	7,78	64,43	5,01	1.338.014.050	64,43	5,01	738.519.511,00
	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	141.655.256	0,53	91,47	0,49	106.672.157	75,30	0,40	34.983.099,00
	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	141.655.256	0,53	91,47	0,49	106.672.157	75,30	0,40	34.983.099,00
21	3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	141.655.256	0,53	91,47	0,49	106.672.157	75,30	0,40	34.983.099,00
	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	9.024.999.281	33,80	94,86	32,06	8.561.361.600	94,86	32,06	463.637.681,00
	3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	9.024.999.281	33,80	94,86	32,06	8.561.361.600	94,86	32,06	463.637.681,00
22	3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	9.024.999.281	33,80	94,86	32,06	8.561.361.600	94,86	32,06	463.637.681,00
	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	273.946.320	1,03	80,19	0,82	218.548.336	79,78	0,82	55.397.984,00



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

	3	30	04	1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	64.253.545	0,24	95,87	0,23	61.602.000	95,87	0,23	2.651.545,00	
24	3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	64.253.545	0,24	95,87	0,23	61.602.000	95,87	0,23	2.651.545,00
	3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	209.692.775	0,79	75,38	0,59	156.946.336	74,85	0,59	52.746.439,00
25	3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	59.693.640	0,22	80,10	0,18	47.813.700	80,10	0,18	11.879.940,00
26	3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	149.999.136	0,56	73,51	0,41	109.132.636	72,76	0,41	40.866.499,00
	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	493.854.849	1,85	79,58	1,47	393.024.227	79,58	1,47	100.830.622,00
	3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	493.854.849	1,85	79,58	1,47	393.024.227	79,58	1,47	100.830.622,00
27	3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	21.930.000	0,08	82,35	0,07	18.059.552	82,35	0,07	3.870.448,00
29	3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	219.497.545	0,82	67,89	0,56	149.020.966	67,89	0,56	70.476.579,00
30	3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	252.427.304	0,95	89,51	0,85	225.943.709	89,51	0,85	26.483.595,00



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

	3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	345.299.098	1,29	93,70	1,21	323.560.000	93,70	1,21	21.739.098,00	
	3	30	06	1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	119.640.000	0,45	90,97	0,41	108.840.000	90,86	0,41	10.800.000,00	
31	3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	118.100.000	0,44	90,86	0,40	107.300.000	90,86	0,40	10.800.000,00
32	3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	1.540.000	0,01	100,00	0,01	1.540.000	100,00	0,01	-
	3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	225.659.098	0,85	95,15	0,80	214.720.000	95,15	0,80	10.939.098,00
33	3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	225.659.098	0,85	95,15	0,80	214.720.000	95,15	0,80	10.939.098,00
	3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	36.011.500	0,13	47,28	0,06	17.027.686	47,28	0,06	18.983.814,00	
	3	30	07	1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	36.011.500	0,13	47,28	0,06	17.027.686	47,28	0,06	18.983.814,00	
34	3	30	07	1.03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	28.611.500	0,11	44,55	0,05	12.747.474	44,55	0,05	15.864.026,00
35	3	30	07	1.03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	7.400.000	0,03	57,84	0,02	4.280.212	57,84	0,02	3.119.788,00
	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	919.729.509	3,44	73,04	2,52	671.800.658	73,04	2,52	247.928.851,00	
	3	31	02	1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	919.729.509	3,44	73,04	2,52	671.800.658	73,04	2,52	247.928.851,00	
36	3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,	252.554.072	0,95	44,57	0,42	112.574.000	44,57	0,42	139.980.072,00



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

		Penyebaran dan Perwilayahan Industri												
37	3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	90.000.000	0,34	98,69	0,33	88.825.000	98,69	0,33	1.175.000,00
38	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	577.175.437	2,16	81,50	1,76	470.401.658	81,50	1,76	106.773.779,00
	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	174.241.787	0,65	37,13	0,24	64.699.000	37,13	0,24	109.542.787,00
	3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	174.241.787	0,65	37,13	0,24	64.699.000	37,13	0,24	109.542.787,00
39	3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	174.241.787	0,65	37,13	0,24	64.699.000	37,13	0,24	109.542.787,00
	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	142.945.948	0,54	64,12	0,34	91.657.000	64,12	0,34	51.288.948,00
	3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	142.945.948	0,54	64,12	0,34	91.657.000	64,12	0,34	51.288.948,00
40	3	31	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	6.650.000	0,02	98,80	0,02	6.570.000	98,80	0,02	80.000,00
41	3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	136.295.948	0,51	62,43	0,32	85.087.000	62,43	0,32	51.208.948,00
TOTAL REALISASI							26.699.962.985	100,00	88,46	88,46	22.097.521.164	82,76	82,76	4.603.101.820,00



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

Tabel 2.9 Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBN Disperindagkop & UKM Tahun 2021

No	Perangkat Daerah / Kode Satker	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
				Fisik	Keuangan
1	Satker 417681	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	836.540.000	97,27	813.697.764
2	Satker 417752	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	629.036.000	91,22	573.777.070
3	Satker 417753	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	401.711.000	99,88	401.240.789
4	Satker 417754	Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	1.037.405.000	99,81	1.035.385.000
Total			2.904.692.000	97,23	2.824.100.623



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan sebanyak 13 Program, 21 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan indikator sasaran sebanyak 8 indikator, untuk data capaian sasaran pada tahun 2021 dapat dilihat pada table 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10 Capaian Sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	68,3%	70,37%	103,03%	Karna adanya covid-19 membuat pengawasan kepada koperasi sempat terganggu dikarenakan adanya kebijakan pembatasan yang dikarenakan pencegahan penyebaran covid-19 dan pengawasan secara daring dirasa tidak terlalu optimal, oleh karena itu Masih terdapat koperasi yang tidak melaksanakan kegiatan RAT, belum memiliki NIK dan Sertifikat NIK dari Kementriaan Koperasi dan UKM dan terdapat koperasi yang belum memenuhi aspek organisasi, aspek usaha, aspek keuangan, aspek sosial dan	Untuk menjaga dan menumbuhkan koperasi sehat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan monitoring dan evaluasi kepada koperasi yang ada secara daring dan secara langsung saat tidak terjadi kegiatan pembatasan covid -19



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

						aspek sumber daya manusia sehingga belum memenuhi kategori koperasi sehat.	
2.	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1,95%	38,87%	1.993,33%	Masih terdapat UMKM yang belum mengetahui proses untuk mengakses KUR yang ada diperbankan, tidak semua pelaku UMKM paham teknologi sehingga kegiatan sosialisasi secara daring cukup menyulitkan dan informasi melalui media social tidak dapat diakses secara maksimal	Dinas Perindagkop melakukan sosialisasi kepada UMKM terkait KUR secara langsung saat pembatasan covid -19 di perlonggar
3.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	5%	59,35%	1.187%	Dikarenakan pandemic Covid -19 banyak UMKM yang sempat menutup usahanya karena minimnya pemasukan.	Dinas perindagkop melakukan pemberian bantuan stimulant permodalan kepada UMKM yang terdampak Covid -19.
4.	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	1,2%	78,42%	6535%	Masih banyak Komoditi ekspor kaltara yang berbentuk mentah dan belum berbentuk produk siap pakai	Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendorong produk-produk UMKM agar produk



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

							UMKM yang telah ada dapat langsung menjadi produk siap pakai
5.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3 ± 1	3,8	78,95	Masih terdapat ketidakstabilan harga dan kelangkaan barang pokok di Kalimantan Utara terutama menjelang HBKN	Melakukan pengawasan dengan melibatkan beberapa instansi untuk menjaga stabilitas harga dan tersedianya Sembilan bahan pokok serta melaksanakan operasi pasar
6.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	7%	6,94%	99,14%	Masih didapati pelaku usaha yang menjual produk dari luar negeri tanpa syarat dan ketentuan jaminan mutu produk negara Indonesia	Melakukan pengawasan dengan melibatkan unsur dari kepolisian untuk menyampaikan pelanggaran atas penjualan barang ilegal



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

7.	Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	2,5%	16%	640%	Masih terdapatnya produk yang kalah bersaing dengan produk luar Provinsi Kalimantan Utara, hal ini dikarenakan kualitas produk yang ditawarkan UMKM masih belum memenuhi standard jual seperti tidak memiliki BPOM, label harga dan kemasan untuk dipasarkan pada pedagang retail.	Melakukan Pelatihan kepada produsen lokal agar lebih menghasilkan produk dengan kualitas lebih baik dan harga dapat bersaing di pasar
8.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	10%	27,28%	2728%	Masih tingginya permintaan industri udang dan biota lainnya serta permintaan industri CPO	Melaksanakan sosialisasi perizinan agar para pelaku industri mudah dalam mengurus perizinan



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2021D Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan sebanyak 13 Program, 21 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan indikator program sebanyak 13 indikator, indikator kegiatan sebanyak 21 indikator dan indicator sub kegiatan sebanyak 37 indikator. untuk data capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
1	Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	11,101,327,785	100%	9,168,219,842	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	17,347,000	2 Dokumen	10,501,685	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17,347,000	2 Dokumen	10,501,685	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	9,341,096,141	12 Bulan	7,811,705,938	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	8,006,558,141	12 Bulan	6,606,199,333	Terjadi proses mutasi, promosi dan pensiun beberapa pegawai sehingga untuk gaji dan tunjangan tidak sesuai dengan target yang ditentukan.	-	-
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	1,334,538,000	12 Bulan	1,205,506,605	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56 Pegawai	35,400,000	32 Pegawai	34,600,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 orang	35,400,000	32 orang	34,600,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	946,864,555	12 Bulan	625,569,028	Tidak ada permasalahan karena target	-	-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

								capaian kinerja telah tercapai		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Unit	48,590,000	13 Unit	39,222,200	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	35,159,003	12 Bulan	32,460,340	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	212,760,046	12 Bulan	194,990,715	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	164,609,506	12 Bulan	38,319,230	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1440 Eksemplar	11,880,000	1440 Eksemplar	9,240,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 kali	473,866,000	130 kali	311,336,543	Untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan karena adanya pandemi covid-19 dan PPKM	-	-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	26,666,500	1 Kegiatan	23,408,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Pengadaan Mebel	17 Unit	26,666,500	17 Unit	23,408,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	127,453,589	12 Bulan	108,845,200	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.640 pcs	11,600,000	1.640 pcs	10,330,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	100,333,589	12 Bulan	90,380,200	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	14,860,000	15 Unit	8,135,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	606,500,000	12 Bulan	553,589,991	Tidak ada permasalahan	-	-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

								karena target capaian kinerja telah tercapai		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 unit	180,000,000	15 unit	129,189,991	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Ruangan	426,500,000	4 Ruangan	424,400,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	13.64%	179,662,090	80%	61,697,300	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Koperasi	179,662,090	17 Koperasi	61,697,300	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	10 Koperasi	179,662,090	17 Koperasi	61,697,300	Pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dikarenakan ada PPKM	Kegiatan dilaksanakan setelah PPKM mengalami penurunan	-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

								level		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	25.00%	1,790,416,000	59,35%	1,081,239,308	Target Capaian Kinerja sebanyak 10 Koperasi yang diawasi melebihi target yaitu 17 Koperasi karena pada tahun 2021 ada penambahan koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	40 UKM	1,790,416,000	40 UKM	1,081,239,308	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	70 UMKM	1,790,416,000	70 UMKM	1,081,239,308	Pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dikarenakan ada PPKM	Kegiatan dilaksanakan setelah PPKM mengalami penurunan level	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	25.00%	2,076,533,561	59,35%	1,338,014,050	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	600 UMKM	2,076,533,561	519 UMKM	1,338,014,050	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	14 Kegiatan	2,076,533,561	14 Kegiatan	1,338,014,050	Target capaian kinerja tidak tercapai karena adanya PPKM sehingga jumlah peserta pelatihan dibatasi untuk menjaga protokol kesehatan	-	-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

2	Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	87.00%	141,655,256	80%	106,672,157	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja mencapai 90%	-	-
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	2652	141,655,256	2328	106,672,157	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja mencapai 90%	-	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	30 pelaku usaha	141,655,256	60 pelaku usaha	106,672,157	Capaian target kinerja melebihi target karena kegiatan dilaksanakan via zoom meeting sehingga bisa mengundang peserta	-	-
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	25.00%	9,024,999,281	25%	8,561,361,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	1 Lokasi	9,024,999,281	1 Lokasi	8,561,361,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	8 Lokasi	9,024,999,281	13 Lokasi	8,561,361,000	Capaian target kinerja melebihi target karena ada sisa lelang SOA yang diakomodir untuk kegiatan SOA di kecamatan lainnya	-	-
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	6.00%	273,946,320	8%	218,548,336	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	1 Kegiatan	64,253,545	1 Kegiatan	61,602,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	13%	64,253,545	9.9%	61,602,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai, karena semakin rendah capaian berarti koefisien variasi harga antar wilayah semakin kecil dan semakin baik	-	-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

			Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2 Kegiatan Pengendalian Harga Barang Provinsi	209,692,775	2 Kegiatan Pengendalian Harga Barang Provinsi	156,946,336	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	13%	59,693,640	9.9%	47,813,700	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai, karena semakin rendah capaian berarti koefisien variasi harga antar wilayah semakin kecil dan semakin baik	-	-
			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Kegiatan	149,999,136	10 Kegiatan	109,132,636	Pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dikarenakan ada PPKM	Kegiatan dilaksanakan setelah PPKM mengalami penurunan level	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	48.00%	493,854,849	53%	393,024,227	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang	493,854,849	3 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang	393,024,227	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Pameran Dagang Internasional/Nasional	1 Kegiatan	21,930,000	0 Kegiatan	18,059,552	Sub Kegiatan mengalami refocusing dan pergeseran ke sub kegiatan lainnya	-	-
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	2 Produk	219,497,545	4 Produk	149,020,966	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	60 Pelaku Ekspor	252,427,304	60 Pelaku Ekspor	225,943,709	Pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dikarenakan ada PPKM	Kegiatan dilaksanakan setelah PPKM mengalami penurunan level	-
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	35.00%	345,299,098	40%	323,560,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan Perlindungan Konsumen	119,640,000	2 Kegiatan Perlindungan Konsumen	108,840,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	24 Permasalahan	118,100,000	12 Permasalahan	107,300,000	Permasalahan Konsumen yang dilaporkan ke BPSK Kota Tarakan dan Bulungan hanya 12 Permasalahan	-	-
			Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	1 Rakor	1,540,000	1 Rakor	1,540,000	Pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dikarenakan ada PPKM	kegiatan Rakor diadakan dengan Luring dan Daring dan menjaga protocol kesehatan	-
			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	5 Kab/Kota	225,659,098	5 Kab/Kota	214,720,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	5 Kegiatan	225,659,098	12 Kegiatan	214,720,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	11.00%	36,011,500	8%	17,027,686	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 Kegiatan Peningkatan Produk Dalam Negeri	36,011,500	2 Kegiatan Peningkatan Produk Dalam Negeri	17,027,686	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Sosialisasi	28,611,500	1 Sosialisasi	12,747,474	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2 Sarana	7,400,000	0 Sarana	4,280,212	Target Capaian tidak tercapai karena anggaran mengalami refocusing dan pergeseran ke sub kegiatan lainnya	-	-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

3	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	35.00%	919,729,509	35%	671,800,658	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 Kegiatan	919,729,509	3 Kegiatan	671,800,658	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Kali	252,554,072	1 Kali	112,574,000	Pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dikarenakan ada PPKM	kegiatan Rakor diadakan dengan Luring dan Daring dan menjaga protocol kesehatan	-
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Sarana	90,000,000	1 Perencanaan	88,825,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20 Pelaku Industri	577,175,437	26 Pelaku Industri	470,401,658	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	35.00%	174,241,787	35%	64,699,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	17 Perusahaan	174,241,787	17 Perusahaan	64,699,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	20 Pelaku Industri	174,241,787	31 Perusahaan	64,699,000	Pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dikarenakan ada PPKM	kegiatan Rakor diadakan dengan Luring dan Daring dan menjaga protocol kesehatan	-
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.00%	142,945,948	100%	91,657,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Informasi	142,945,948	1 Informasi	91,657,000	Tidak ada permasalahan karena target capaian kinerja telah tercapai	-	-
			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	0 Sistem	6,650,000	0 Sistem	6,570,000	Anggaran Sub Kegiatan mengalami refocusing dan pergeseran	-	-
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	30 Perusahaan	136,295,948	31 Perusahaan	85,087,000	Pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dikarenakan ada PPKM	kegiatan Rakor diadakan dengan Luring dan Daring dan menjaga protocol kesehatan	-
TOTAL PAGU						26,699,962,985		22,097,520,564		



3.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, terdapat 13 program yang didukung 21 kegiatan.

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan target kinerja unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran yang terlayani didukung oleh perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Serta mendukung seluruh pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021.

Untuk Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan target kinerja jumlah koperasi yang melakukan RAT sebesar 13.64% di dukung kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, serta mendukung sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021 yaitu Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat dengan target capaian persentasi koperasi aktif sebesar 68,3% dan capaian sasaran pada tahun 2021 adalah 70,37%.

Untuk Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan target kinerja Persentase pertumbuhan UKM baru sebesar 25% didukung kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, serta mendukung sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021 yaitu Meningkatnya



UMKM yang mengakses KUR dengan target capaian Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR sebesar 1,95% dan capaian sasaran pada tahun 2021 adalah 38,87%.

Untuk Program Pengembangan UMKM dengan target kinerja Persentase pertumbuhan UKM baru sebesar 25% didukung kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, serta mendukung sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021 yaitu Meningkatnya Pertumbuhan UMKM dengan target capaian Pertumbuhan UMKM sebesar 5% dan capaian sasaran pada tahun 2021 adalah 59,36%.

Untuk Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan target kinerja kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun dan didukung dengan kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API), serta mendukung sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021 yaitu Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara dengan target capaian Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara sebesar 1,2% dan capaian sasaran pada tahun 2021 adalah 39,74%.

Untuk Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target kinerja Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun sebesar 25 % dan didukung kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas), serta mendukung sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021 yaitu Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah dengan target capaian Persentase Inflasi Pangan Begejolak sebesar 3 ± 1 dan capaian sasaran pada tahun 2021 adalah 3,8%



Untuk Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan target kinerja Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu sebesar 6% dan didukung kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi dan kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan), serta mendukung sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021 yaitu Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah dengan target capaian Persentase Inflasi Pangan Begejolak sebesar 3 ± 1 dan capaian sasaran pada tahun 2021 adalah 3,8%.

Untuk Program Pengembangan Ekspor dengan target kinerja Persentase Peningkatan Jenis Komoditi Ekspor sebesar 48% dan didukung kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi), serta mendukung sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021 yaitu Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara dengan target capaian Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara sebesar 1,2% dan capaian sasaran pada tahun 2021 adalah 39,74%.

Untuk Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan target kinerja Persentase Peredaran Barang/Jasa yang tidak memenuhi syarat ketentuan jual sebesar 35% dan didukung kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota), serta mendukung sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021 yaitu Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk



dengan target capaian Persentase Barang yang tidak sesuai standar sebesar 7% dan capaian sasaran pada tahun 2021 adalah 6,94%.

Untuk Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dengan target kinerja Persentase usaha perdagangan dalam negeri yang dibina sebesar 11% dan didukung Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri), serta mendukung sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021 yaitu Meningkatnya Pasar Produk Lokal dengan target capaian Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB sebesar 2,5% dan capaian sasaran pada tahun 2021 adalah 16%.

Untuk Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan target kinerja Persentase industri, kecil dan menengah yang sehat sebesar 35% dan didukung kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, serta mendukung sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021 yaitu Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri dengan target capaian Persentase peningkatan kontribusi sektor industri sebesar 10% dan capaian sasaran pada tahun 2021 adalah 27,28%.

Untuk Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan target kinerja Persentase industri, kecil dan menengah yang sehat sebesar 35% dan didukung kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi, serta mendukung sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021 yaitu Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri dengan target capaian Persentase peningkatan kontribusi sektor industri sebesar 10% dan capaian sasaran pada tahun 2021 adalah 27,28%



Untuk program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan target kinerja pengelolaan sistem informasi industri nasional yang terlaksana sebesar 100% didukung dengan kegiatan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan provinsi berbasis sistem informasi industri nasional (siinas) dan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas, serta mendukung sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021 yaitu Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri dengan target capaian Persentase peningkatan kontribusi sektor industri sebesar 10% dan capaian sasaran pada tahun 2021 adalah 27,28%.

3.5 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam table 2.12 sebagai berikut :

Tabel 2.12 Kebijakan Strategis

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Meningkatkan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2038	Mewujudkan rencana pembangunan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2038



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

2.	Mengoptimalkan Pengendalian Izin Usaha Industri	<ul style="list-style-type: none">- Permenperin No. 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik- Permenrin No.9 Tahun 2021 tentang standaar kegiatan dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor perindustrian	Menertibkan perizinan industry berbasis online
3.	Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	<ul style="list-style-type: none">- Permenrin No. 38 tentang Sistem Informasi Industri Nasional- Permenrin No 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Menertibkan perizinan industry berbasis online
4.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Mengurangi deviasi harga jual di daerah 3T



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

5.	Menjaga Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting)	Agar harga barang kebutuhan pokok dan barang penting stabil dan tidak mengalami inflasi yang tinggi
6.	Meningkatkan Perlindungan Konsumen	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Melakukan pengawasan dalam rangka meminimalisir barang beredar yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku
7.	Meningkatkan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Agar konsumen dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
8.	Mengoptimalkan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Ekspor		Agar para pelaku ekspor menggunakan form SKA dalam dokumen ekspornya
9.	Mengembangkan Ekspor		Peningkatan produk lokal berorientasi ekspor dan meningkatkan nilai ekspor bersih Kaltara
10.	Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian	Meningkatkan koperasi sehat dan aktif di Provinsi Kalimantan Utara
11.	Meningkatkan dan Mengembangkan Pemberdayaan	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2020	Tata Cara Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

	Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019
--	--	--	--



3.6 Dokumentasi Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran dituangkandalam table 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1.4 Dokumentasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disperindagkop & UKM Sumber Dana APBD TA. 2021

No	Uraian Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
1.	Kegiatan Rapat		Kegiatan Senam Dilaksanakan setiap hari Jumat, dimana dilakukan sebulan 2 kali untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani pegawai Dinas Perindagkop & UKM



Program : Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat

2 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



➤ Dokumentasi Pengawasan Koperasi Konsumen Ekonomi Raya Kaltara Kota Tarakan



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



➤ Dokumentasi Pengawasan Koperasi Jasa Pemuda Pancasila Bulungan Kabupaten Bulungan

➤ Dokumentasi Pengawasan Koperasi Jaya Bersama Kabupaten Bulungan



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



21 Jun 2021 10:36
Gunung Sari
Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan
Kalimantan Utara



21 Jun 2021 12:03:32
Gunung Sari
Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan
Kalimantan Utara



01/10/2021 10:32



➤ Dokumentasi Pengawasan Koperasi Produsen Taruna Kebangkitan Nusantara Kabupaten Bulungan

➤ Dokumentasi Pengawasan Koperasi Pemasaran Darul Ilmi Tarakan Kota Tarakan



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



➤ Dokumentasi Pengawasan
Koperasi Produsen
Perikanan Mina Jaya
Lestari
Kabupaten Tana Tidung

➤ Dokumentasi
Pengawasan
Koperasi Pemasaran
Mitra Sawit Intimung
Kabupaten Malinau



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



- Dokumentasi Pengawasan Koperasi Konsumen Tobana Hikmah Jaya Tarakan Kabupaten Kota Tarakan



- Dokumentasi Pengawasan Koperasi Jasa Primer Upun Taka Kodim Tnt Kabupaten Tana Tidung



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



- Dokumentasi Pengawasan Koperasi Konsumen Permata Citra Jaya Kota Tarakan





Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha MIKRO (UMKM)

Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan : Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

3 Sosialisasi Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Usaha Mikro Kabupaten Nunukan

- Dilaksanakan di Hotel Neo Fortune Jl. Ahmad Yani, Nunukan 21 September 2021
- Peserta :
Pelaku UKM Kabupaten Nunukan = 30 (tigapuluh) orang
Pengurus PKK Kabupaten Nunukan = 5 (lima) orang



- Narasumber :
1. Drs. H. Abdul Karim, M.Si. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Nunukan
 2. Budi Sukoyo Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Nunukan
 3. Yosia Ranga W Analis Kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimara Cabang Nunukan
 4. Hendra Mantri PT. BRI Cabang Nunukan
 5. Fahrurrozi Tim Mikro PT. Pegadaian Cabang Nunukan



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

Sosialisasi Pembiayaan
Bagi Pelaku Usaha Kecil
dan Usaha Mikro
Kabupaten Tana Tidung



- Dilaksanakan di Penginapan Acacia Jl. Tanah Abang, Tideng Pale 22 Nopember 2021
- Peserta yang mengikuti :
 - Pelaku UKM Kabupaten Tana Tidung = 30 (tigapuluh) orang
 - Pengurus PKK Kabupaten Tana Tidung = 5 (lima) orang
- Narasumber :
 1. Pratiwi, S.T.
Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Tana Tidung
 2. Hery Ariyanto
Pimpinan PT. BPD Kaltimtura Cabang Tideng Pale
 3. Haris Dahlan Pardede
Kepala PT. BRI Unit Tana Tidung
 4. Ervianta, S.E.
Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Regional Malinau - Tana Tidung



Program : Pengembangan UMKM

Kegiatan : Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

4 Pelatihan Dana Alokasi Khusus Tahun 2021



- Pelatihan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi Koperasi di Bulungan, Maret 2021
- Dilaksanakan selama 3 hari
- Diikuti sebanyak 40 Peserta
- Narasumber Ikhsan Kurniawan, S.E



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



- Pelatihan Kewirausahaan, Keamanan Pangan dan Peningkatan Manajemen di Tanjung Palas Tengah (Salim Batu), tanggal 14-16 September 2021
- Dilaksanakan selama 3 hari
- Diikuti sebanyak 35 Peserta
- Narasumber :
 1. Hj. Hasriyani, S.H.,M.M
 2. Damrin, S.E., M.A.P
 3. Kasmawati, S. Farm. Apt
 4. Dedy Kurniawan, S.Pd

- Pelatihan Strategi Pemasaran, Pembukuan dan Laporan Keuangan bagi UMKM di Tanjung Selor tanggal 22 - 24 September 2021
- Dilaksanakan selama 3 hari
- Diikuti sebanyak 35 Peserta
- Narasumber :
 1. Dedy Kurniawan, S.Pd
 2. Sri Mulyani Rahayu, S.Pd
 3. Nitalati Sebela Ekapasi, S.Pdi



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



- Pelatihan Kewirausahaan bagi Usaha Pemula di Tanjung Palas, tanggal 28 - 30 September 2021
- Dilaksanakan selama 3 hari
- Diikuti sebanyak 45 Peserta
- Narasumber :
 1. Dedy Kurniawan, S.Pd
 2. Sri Mulyani Rahayu, S.Pd
 3. Nitalati Sebela Ekapasi, S.Pdi

- Pelatihan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi Koperasi di Tanjung Selor, tanggal 28 - 30 September 2021
- Dilaksanakan selama 3 hari
- Diikuti sebanyak 24 Peserta
- Narasumber :
 1. Ikhsan Kurniawan, S.E.Sri



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



- Pelatihan Kewirausahaan bagi pelaku UMKM di KTT tanggal 7-9 Oktober 2021
- Dilaksanakan selama 3 hari
- Diikuti sebanyak 35 Peserta
- Narasumber :
 1. Sri Mulyani Rahayu, S.Pd
 2. Nitalati Sebela Ekapasi, S.Pdi

- pelatihan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi Koperasi di KTT tanggal 7-9 Oktober 2021
- Dilaksanakan selama 3 hari
- Diikuti sebanyak 25 Peserta
- Narasumber :
 1. Sri Mulyani Rahayu, S.Pd
 2. Nitalati Sebela Ekapasi, S.Pdi



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



- Pelatihan Kewirausahaan Bagi Usaha Pemula di Tarakan, tanggal 21-23 Oktober 2021
- Dilaksanakan selama 3 hari
- Diikuti sebanyak 35 Peserta
- Narasumber :
 1. Sri Mulyani Rahayu, S.Pd
 2. Nitalati Sebela Ekapasi, S.Pdi

- Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengawas dan Pengurus Koperasi di Tarakan, tanggal 21-23 Oktober 2021
- Dilaksanakan selama 3 hari
- Diikuti sebanyak 35 Peserta
- Narasumber :
 1. Sri Mulyani Rahayu, S.Pd
 2. Nitalati Sebela Ekapasi, S.Pdi



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



- Pelatihan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Bagi Koperasi di Nunukan, tanggal 21-23 Oktober 2021
- Dilaksanakan selama 3 hari
- Diikuti sebanyak 35 Peserta
- Narasumber :
 1. Sri Mulyani Rahayu, S.Pd
 2. Nitalati Sebela Ekapasi, S.Pdi

- Pelatihan Kewirausahaan Bagi Usaha Pemula di Nunukan, tanggal 28-30 Oktober 2021
- Dilaksanakan selama 3 hari
- Diikuti sebanyak 40 Peserta
- Narasumber :
 1. Sri Mulyani Rahayu, S.Pd
 2. Nitalati Sebela Ekapasi, S.Pdi



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



- Pelatihan Kewirausahaan Bagi Usaha Pemula di Nunukan, tanggal 28-30 Oktober 2021
- Dilaksanakan selama 3 hari
- Diikuti sebanyak 40 Peserta
- Narasumber :
 1. Sumaji, S.E., M.Pd
 2. Frederik Hitipeuw, A.Md
 3. Germanto

- Pelatihan Perpajakan dan Laporan Keuangan Sederhana Bagi UMKM Sektor Olahan Pangan di Tarakan, 3-5 November 2021
- Dilaksanakan selama 3 hari
- Diikuti sebanyak 52 Peserta
- Narasumber :
 1. Sri Mulyani Rahayu, S.Pd
 2. Dedy Kurniawan, S.Pd



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



- Pelatihan Perpajakan dan Laporan Keuangan Sederhana Bagi UMKM Sektor Olahan Pangan di Tarakan, 3-5 November 2021
- Dilaksanakan selama 3 hari
- Diikuti sebanyak 43 Peserta
- Narasumber :
 - Ikhsan Kurniawan, S.E



Program : Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

5 **Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA**



- Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan dan Penanganan Permasalahan pada Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) diselenggarakan pada tanggal 16 September 2021 di Hotel Paradise Tarakan
- Dilaksanakan selama 1 hari
- Diikuti sebanyak 30 Peserta
- Narasumber Pusat : Damar Wijayanto, SE
- Narasumber Daerah : Hidayat, SE



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



- Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan dan Penanganan Permasalahan pada Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) diselenggarakan pada tanggal 20 September 2021 di Hotel Neo Fortuna Nunukan
- Dilaksanakan selama 1 hari
- Diikuti sebanyak 30 Peserta
- Narasumber Pusat : Hesty Syntia Paramita K., S.Si, M.Bus;
- Narasumber Daerah : Ir. H. Dian Kusumanto, M.Si



Program : Pengembangan Ekspor

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Sub Kegiatan : Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

6



- Kegiatan Pelatihan Prosedur Ekspor bagi Produk Makanan dan Minuman diselenggarakan pada tanggal 4-5 November 2021 di Sayn Café Nunukan
- Dilaksanakan selama 2 hari
- Diikuti sebanyak 30 Peserta
- Narasumber Teknis :
 1. Dr. Ir. Moch. Ardi P. M.Eng. Sc. ME
 2. Ir. Fernanda Reza Muhammad, M.M.;
 3. Hindra Soeparjanto, SE;
 4. Rossanto Dwi Handoyo, SE., M.Si., Ph.D



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



- Kegiatan Pelatihan Prosedur Ekspor bagi Produk Makanan dan Minuman diselenggarakan pada tanggal 1-2 November 2021 di Hotel Neo Paradise Tarakan
- Dilaksanakan selama 2 hari
- Diikuti sebanyak 30 Peserta
- Narasumber Teknis :
 1. Dr. Ir. Moch. Ardi P. M.Eng. Sc. ME
 2. Ir. Fernanda Reza Muhammad, M.M.
 3. Hindra Soeparjanto, SE
 4. Rossanto Dwi Handoyo, SE., M.Si., Ph.D



Program : Pengembangan Ekspor

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Sub Kegiatan : Peningkatan Citra Produk Ekspor

<p>7 Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor dilaksanakan di Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan</p>		<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dengan tujuan meningkatkan produk daerah menjadi lebih berdaya jual dan menghasilkan produk yang beraneka ragam.➤ Pelaku Usaha yang mengikuti kegiatan telah melalui tahap seleksi.➤ Nama kegiatan : designer dispatch service (DDS) Mandiri tahun 2021➤ Tempat : Kab. Malinau➤ Jumlah Peserta 2 UKM➤ Waktu : tahap 1 tgl 5 -8 Oktober, tahap 2 tgl 30 Nov - 3 Desember 2021➤ Narasumber : Desainer a.n Jamal Fajar Hardy dari IDDC, DJPEN, Kementerian Perdagangan RI
--	---	--



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara





Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara





Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

8 Pelaksanaan Kegiatan SOA Barang diadakan di 13 lokasi



- Pelaksanaan Kegiatan SOA di 13 lokasi, yaitu :
- Kecamatan Kayan Hilir
 - Kecamatan Sungai Tubu
 - Kecamatan Bahau Hulu
 - Kecamatan Pujungan
 - Kecamatan Mentarang Hulu
 - Kecamatan Lumbis Hulu
 - Kecamatan Lumbis Panasiangan
 - Kecamatan Lumbis Ogong
 - Kecamatan Tulin Onsoi
 - Kecamatan Seimenggaris
 - Kecamatan Nunukan Barat
 - Kecamatan Krayan
 - Kecamatan Sembakung Atulai



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara





Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor

9 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor

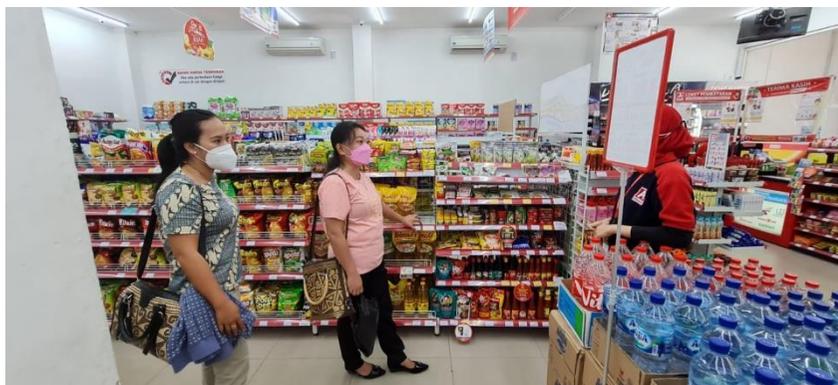




Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Kegiatan : Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota





Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara





Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Kegiatan : Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sub Kegiatan : Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kecamatan Betayau
Kabupaten Tana Tidung ⇨



- Sasaran kegiatan adalah membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat yang berdampak dari adanya kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Kalimantan Utara.
- Kegiatan Pasar Murah Tahun 2021 didukung oleh :
 1. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.
 2. Dinas Pertanian dan



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

Desa Sesua Kecamatan
Malinau Barat Kabupaten
Malinau ⇨



Kecamatan Malinau Kota
Kabupaten Malinau ⇨



Ketahanan Pangan
Provinsi Kalimantan
Utara.

3. Biro Ekonomi dan
Pembangunan
Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan
Utara.
4. Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi
Kalimantan Utara.
5. Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan
Utara.
6. Biro Umum dan
Perlengkapan
Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan
Utara.
7. Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Kalimantan



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

Desa Mansalong
Kecamatan Nunukan
Selatan Kabupaten
Nunukan ⇨



Desa Tanah Kuning
Kecamatan Tanjung Palas
Timur Kabupaten
Bulungan ⇨



Utara.

8. Dinas Perdagangan
9. Kabupaten/Kota
dilingkungan Provinsi
Kalimantan Utara.
10. Camat dan Lurah
tempat titik lokasi
pelaksanaan pasar
murah.



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

Hotel Luminor,
Tanjung Selor ⇨



Desa Sebidai Kabupaten
Tana Tidung ⇨





Desa Batu Lidung
Kabupaten Malinau ⇨



Desa Tengkapak Kabupaten
Bulungan ⇨





Desa Sembakung Atulai dan
Lumbis Mansalong
Kabupaten Nunukan ⇨





Program : Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen



- Pelaksanaan pengawasan dilakukan di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.
- personil yang ikut tergabung didalamnya melibatkan:
 1. Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltara
 2. Dinas Perindagkop Kabupaten/Kota
 3. Biro Perekonomian
 4. BPOM Loka Tarakan



Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Kegiatan : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Sosialisasi RPIK untuk 5 Kabupaten /Kota se Kalimantan Utara



- Dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Tarakan, tanggal 19 Oktober 2021
- Narasumber :
 - R. Budiono Subambang, ST., MPM
 - Andi Rizaldi, ST., MM
 - Nyimas Dwi Koryati, SE., M.Si
 - Lusiana Tanjung, S.Kom., M.Kom



Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Kegiatan : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat



Boneka Rajut

- Belanja Barang Pameran Dekranasda dan Seragam Batik Pengurus Dekranasda



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



➤ Belanja Lemari untuk ruang pameran di Bandara Juata

➤ Kegiatan Musda Dan Pelantikan Pengurus Dekranasda Provinsi Kalimantan Utara Masa Bakti 2021-2024



Program : Pengendalian Izin Usaha Industri

Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI

Kewenangan Provinsi

Sosialisasi Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi



- Dilaksanakan Di Hotel Grand Citra Kota Tarakan
- Narasumber
 1. David Gunawan, S.Hut, M.Ap dari Dinas PMPTSP Prov. Kaltara
 2. Iwan Abdullah, SH, M.HP dari Dinas PMPTSP Kota Tarakan
 3. Candra Kristanti W, SH dari Dinas PMPTSP Kota Tarakan



Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

Sosialisasi Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Berbasis



- Sosialisasi diadakan di Hotel Swissbel Kota Tarakan selama 3 hari
- Diikuti sebanyak 30 peserta dari Disperindagkop dan UKM Kab. Kota dan Perusahaan
- Dengan narasumber Nurhalimah Harahap, ST, M.T.I. (Dari Pusat Data dan Informasi Industri Nasional PUSDATIN)



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**



BAB IV PENUTUP

Dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Program ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi awal serta masukan bagi Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara agar dapat menjadi OPD yang lebih baik kedepannya ditengah segala keterbatasan yang ada semoga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan Kalimantan Utara.

Secara umum dalam buku ini kami menyajikan informasi dalam bentuk data atas apa saja yang telah Disperindagkop & UKM Provinsi Kalimantan Utara kerjakan Tahun 2021.

Pada kesempatan ini juga, kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar besarnya kepada:

- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- Kementerian Koperasi & UKM Republik Indonesia
- Gubernur Kalimantan Utara
- Wakil Gubernur Kalimantan Utara
- Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- Pejabat Eselon II, III, IV, Pemprov Kaltara beserta Staf
- Pelaku dunia Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM)
- Serta pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini

Semoga apa yang menjadi harapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat terwujud untuk “BERUBAH MAJU SEJAHTERA” atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Tanjung Selor, 07 Februari 2021

Pt. Kepala Dinas,



Isriyani, SH., MM

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19730717 200312 2 008



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

